



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

oleh

Aditya Putra Widiagma

NIM 110810301001

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

Aditya Putra Widiagma

NIM 110810301001

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

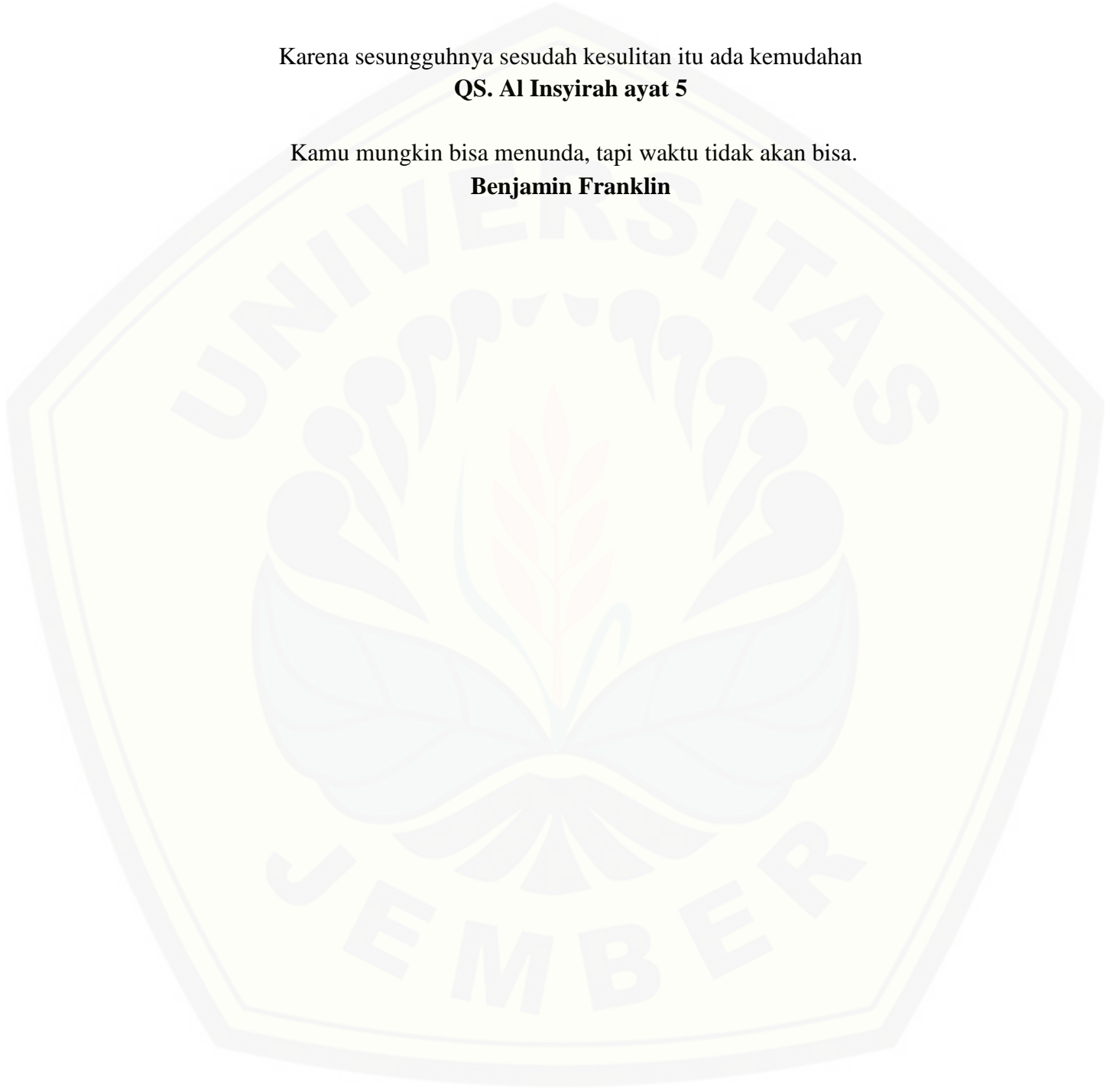
Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMU-lah akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku tercinta, Kuntum Widayati dan Agus Muhid yang telah memberikan pelajaran hidup serta pendidikan hingga di bangku kuliah;
3. Adik-adikku Vania Putri Widiagma dan Prayoga Widiagma Putra tersayang;
4. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

MOTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
QS. Al Insyirah ayat 5

Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan bisa.
Benjamin Franklin



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Putra Widiagma

NIM : 110810301001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2015

Yang menyatakan,

Aditya Putra Widiagma
NIM 110810301001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM) DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Mahasiswa : Aditya Putra Widiagma

Nomor Induk Mahasiswa : 110810301001

Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 10 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Nining Ika Wahyuni SE., M.Sc., Ak
NIP. 19600103 199103 1 001

Bunga Maharani SE., M.SA.
NIP. 19660805 1992012001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP 19710727 199512 1 001

SKRIPSI

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh

Aditya Putra Widiagma

NIM 110810301001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nining Ika Wahyuni SE., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Bunga Maharani SE., M.SA.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

***PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aditya Putra Widiagma

NIM : 110810301001

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 September 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak (.....)
NIP 196701021992032002

Sekretaris : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak (.....)
NIP 197102172000031001

Anggota : Septarina Prita DS, M.SA, Ak (.....)
NIP 198209122006042002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2011-2013 dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2012-2014. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menyebabkan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk pada suatu daerah, maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi.

Kata kunci: Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk

Aditya Putra Widiagma

Department of Accountancy, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the Human Development Index (HDI) and Total Population against Capital Expenditure on district / municipal governments in the province of East Java. This research used secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics in 2012 to 2014 and the Directorate General of Fiscal Balance in 2011 to 2013. Methods of data analysis using Descriptive Statistics, Classical Assumption Test and Hypothesis Test consisted of Regression Methods, Coefficient of Determination, F test , as well as the t test. The results showed that the Human Development Index and Total Population has positive influence on Capital Expenditure. this causes the higher amount of the Human Development Index and population in an area, then the capital expenditures in the region are becoming increasingly high.

Keyword: *Capital Expenditures, Index of Human Development, Total Population.*

RINGKASAN

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; Aditya Putra Widiagma, 110810301001; 2015; 79 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi daerah yang merupakan hak dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya dalam kegiatan pemerintahan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik.

Peningkatan pelayanan pada sektor publik dapat meningkatkan minat para investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Maka dari itu, perubahan komposisi belanja merupakan upaya logis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Maharani dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012). Menurut

Kusnandar dan Siswanto (2012), dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pada saat ini, banyak penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintahan daerah, namun hanya fokus dari segi keuangannya saja seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut tentu mempengaruhi besarnya belanja modal pemerintah daerah karena pada dasarnya pendapatan akan digunakan untuk belanja dan pembiayaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah dari segi eksternal atau non keuangan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Penduduk diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anggaran belanja modal pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Penelitian ini memilih Provinsi Jawa Timur dikarenakan lokasi ini merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia

setelah Jawa Barat. Sebagai daerah dengan penduduk yang banyak tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan keajahteraan masyarakatnya. Selain itu tempat penelitian ini memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik, yaitu sebesar 66,65%.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan arah hubungan yang bersifat positif, yang bermakna jika Jumlah Penduduk suatu daerah tinggi maka jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan menjadi tinggi.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si.,Ak. dan Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Nining Ika Wahyuni SE., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Bunga Maharani SE., M.SA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku, Dra. Kuntum Widayati dan Agus Muhid yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Adik-adikku Vania Putri Widiagma dan Prayoga Widiagma Putra tersayang;

9. Sahabat-sahabat terbaikku (Iqbal, Fathur, Rozy, Dio, Natak, Agung, Lucha, Denok, Naufal, Syiva, Khusnul, Ravika, Yudha, Shella, Rahayu, Sherly, Andik, Eza, Andin, Aji, Resky, Geby, dan Eka);
10. Tria Oktaviasari yang selalu menghibur serta memberikan dorongan dan semangatnya;
11. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2012 dan 2013 yang telah memberikan keluarga kedua;
12. Keluarga *Accounting Adventure* yang telah membagi kehangatan dengan petualangannya;
13. Keluarga KKN 27 Karangrejo (Hanif, Kukuh, Reddy, Aan, Mas Latif, Emi, Maria, Nia, dan Mala) yang telah membagi kenangan berharganya;
14. Keluarga Kos Nias 22 yang telah memberi kenangan dan semangat;
15. Teman seperjuangan Akuntansi 2011, terima kasih atas kerjasamanya selama ini;
16. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	8
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	10
2.1.3 Belanja Modal	16
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2.1.5 Jumlah Penduduk	24

2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Teoritis	27
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian	28
2.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal	28
2.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal	30
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis dan Sumber Data	32
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.4.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	33
3.4.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	34
3.5 Metode Analisis	36
3.5.1 Statistik Deskriptif	36
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.5.3 Pengujian Hipotesis	39
3.5.4 Kerangka Pemecahan Masalah	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	42
4.2 Analisis Data.....	43
4.3 Statistik Deskriptif	43
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	47
4.4.1 Uji Normalitas	47
4.4.2 Uji Multikolienaritas	49
4.4.3 Uji Heteroskedasitas	50
4.4.4 Uji Autokorelasi	52
4.5 Pengujian Hipotesis.....	53
4.5.1 Uji F	53

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.5.3 Analisa Regresi Linier Berganda	55
4.5.4 Uji t (Uji Parsial)	56
4.6 Pembahasan Hipotesis	57
4.6.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal	57
4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal	58
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Luas Wilayah Beberapa Provinsi di Pulau Jawa, 2013.....	3
2.1 Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	22
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	38
4.1 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	42
4.2 Statistik Deskriptif Variabel yang Diteliti	43
4.3 Rincian Data Outlier	44
4.4 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang Digunakan Setelah Deteksi Outlier	44
4.5 Statistik Deskriptif Variabel yang Diteliti	45
4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	49
4.7 Hasil Uji Multikolienaritas.....	50
4.8 Hasil Uji GLEJSER	52
4.9 Hasil Uji Autokorelasi	52
4.10 Hasil Uji F.....	53
4.11 Hasil Koefisien Determinasi	54
4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
4.13 Hasil Uji t (Uji Parsial)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Jawa Timur dengan Provinsi Lain, 2013	4
2.1 Struktur APBD	14
2.2 Kerangka Penelitian	28
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	41
4.1 Hasil Uji Normalitas	48
4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas	51
4.3 Penjelasan Hasil Penelitian	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian.....	66
2. Data Penelitian Setelah Deteksi Outlier dan Dilakukan Standarisasi Data	69
3. Statistik Deskriptif	73
4. Hasil Uji Normalitas	74
5. Hasil Uji Multikolinieritas.....	75
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
7. Hasil Uji Autokorelasi	77
8. Pengujian Hipotesis	78

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan segala kegiatannya sendiri tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah bebas menggunakan sumber dayanya, baik sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, maupun sumber daya alamnya untuk menjalankan kegiatannya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi daerah yang merupakan hak dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya dalam kegiatan pemerintahan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik.

Peningkatan pelayanan pada sektor publik dapat meningkatkan minat para investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Maka dari itu, perubahan komposisi belanja merupakan upaya logis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta

tetap lainnya (Maharani dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012). Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012), dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok administrasi umum (PP No. 71 Tahun 2010). Dalam menganggarkan belanja modalnya, pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi dan potensi daerahnya agar kualitas pelayanan publik dan pembangunan pada daerah tersebut dapat berjalan dengan optimal. Pada saat ini, banyak penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintahan daerah, namun hanya fokus dari segi keuangannya saja seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut tentu mempengaruhi besarnya belanja modal pemerintah daerah karena pada dasarnya pendapatan akan digunakan untuk belanja dan pembiayaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah dari segi eksternal atau non keuangan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

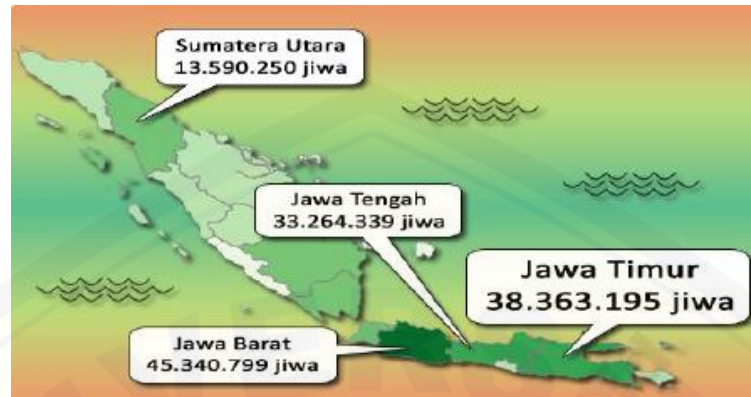
Dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk diartikan sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara yang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara. Jadi, jumlah penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Penelitian ini memilih Provinsi Jawa Timur dikarenakan lokasi ini merupakan salah satu provinsi yang terluas di Pulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Beberapa Provinsi di Pulau Jawa, 2013

Provinsi	Luas Wilayah (KM ²)
Jawa Timur	47 799,75
Jawa Barat	35 377,76
Jawa Tengah	32 800,69
Banten	9 622,00
DI Yogyakarta	3133,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Timur dengan Provinsi Lain, 2013

Sebagai daerah dengan penduduk terbanyak setelah Jawa Barat tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan keajahteraan masyarakatnya. Selain itu tempat penelitian ini memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik, yaitu sebesar 66,65 %. Realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2013 dari sektor hasil pajak daerah sebesar 9.404,93 milyar rupiah, sektor redistribusi daerah 106,21 milyar rupiah, sektor pengolahan kekayaan daerah 332,02 milyar rupiah dan sektor penerimaan lainnya 1.736,17 milyar rupiah (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2014).

Selain itu, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki berbagai prestasi, diantaranya adalah:

- Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 7,2 persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50 persen, sedangkan tahun 2010 mencapai 6,68 persen.
- Selain pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, capaian kinerja perekonomian Provinsi Jatim dapat dilihat dari peroleh besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2008 PDRB Jatim sebesar Rp 621,39

triliun meningkat menjadi Rp 686,85 triliun (2009), Rp 778,46 triliun (2010), dan Rp. 895,22 triliun (2011).

- Salah satu komponen PDRB ditentukan oleh konsumsi. Yang menarik, untuk konsumsi usaha ekonomi produktif sebanyak 80 persen.
- Realisasi investasi di Jatim 2011 mencapai Rp 110,48 triliun atau meningkat 133,79 persen dibanding 2010. “Pertumbuhan ekonomi di Jatim yang bagus ini paling inklusif (memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat) di Indonesia,” jelas Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur).
- Di Indonesia ada penurunan kemiskinan 130.000, ternyata 128.900 (99,15 persen) penurunan kemiskinan terjadi di Jatim.
- Berdasarkan data BPS Jatim edisi Februari 2012 secara akumulatif, nilai ekspor Januari-Desember 2011 mencapai USD 19.029,06 juta atau naik sebesar 35,18 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2010 yang mencapai USD 14.076,48 juta.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Pemprov Jatim. Opini WTP adalah penilaian laporan keuangan terbaik. Hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 34.A/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 23 Juni 2011. (Publiknasional, 2012)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Andaiyani (2012) yang menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional pada penelitiannya. Objek penelitian berada di Provinsi Kalimantan Barat dan periode pengamatan dari tahun 2007-2010. Objek penelitian dan periode pengamatan, serta variabel penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Objek dari penelitian ini pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan 2011-2013. Sedangkan variabel pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.

Lin dan Liu (2000) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Jumlah Penduduk (Total Population (TPOP) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Andaiyani (2012) dan Erlis (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hartyanto (2014) membuktikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Sularno (2013) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga peneliti menduga bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan variabel. Objek penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan 2012-2014. Sedangkan variabel pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
- b. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal

- b. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat oleh berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi pemerintahan daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pengaruh indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

- b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan yang lebih luas terhadap belanja modal pemerintah daerah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi, bahan rujukan, dan referensi bagi pengembangan pengetahuan peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak prinsipal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal. Di organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktekkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia (Mardiasmo, 2002). Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah. Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman pada kebijakan umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). Konflik kepentingan akan muncul dan pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen tidak dalam kepentingan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Eksekutif (Pemda) memiliki keunggulan dalam penguasaan informasi dibandingkan legislatif (DPRD). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan

masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan dan dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. *Slack* tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku oportunistik legislatif terlihat lebih jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat (Halim & Syukri, 2006).

Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih atau publik.

a. Hubungan Keagenan antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen dan legislatif (DPRD) bertindak sebagai prinsipal. Pemda menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda).

b. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik

Dalam hubungan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Von Hagen (2003) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Nordiawan et al. (2009:39), APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan dalam tahun bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah (barang atau uang dan/ atau jasa) atau dana darurat.

2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- Belanja langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah didanai dari dan atas beban APBN.

Untuk kepentingan administratif, pengawasan dan evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut *urusan wajib* mencakup

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut *urusan pilihan* mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

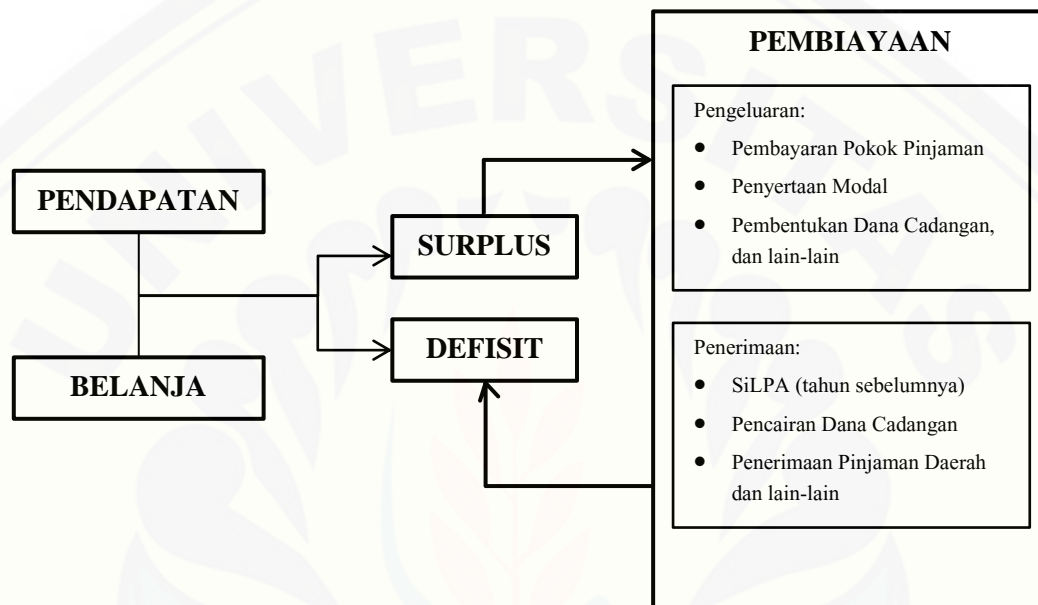
Klasifikasi belanja menurut *organisasi* disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara. Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri atas:

1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum

6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial



Gambar 2.1 Struktur APBD

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit APBD. Surplus terjadi ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dan sebaliknya jika pendapatan daerah dalam satu tahun diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya, maka akan terjadi defisit APBD.

Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemda lain. Surplus juga dapat digunakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan social, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan

pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus.

Dalam hal APBD defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Baik surplus maupun defisit, pemda wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD-nya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

6. Penerimaan piutang daerah

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penerimaan modal (investasi) pemda
3. Pembayaran pokok utang
4. Pemberian pinjaman daerah

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok administrasi umum (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja modal meliputi antara lain:

- a. Belanja modal tanah, yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- b. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/pembuatan/perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- e. Belanja modal fisik lainnya, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan/ perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal di atas. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Sumber dana untuk belanja modal pemerintah daerah berasal dari pendapatan yang diterima oleh daerah, sebagaimana pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yaitu terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah (barang atau uang dan/ atau jasa) atau dana darurat. (PP No. 71 Tahun 2010).

Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menghasilkan aset tetap yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam pemanfaatan aset tetap tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat, misalnya jalan raya, jembatan, trotoar, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan; dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik, misalnya gedung kantor pemerintahan daerah. Karena berhubungan dengan kepentingan publik, besarnya belanja modal dipengaruhi dengan jumlah penduduk pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan penduduk yang lebih banyak memungkinkan daerahnya mengeluarkan belanja modal yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dikarenakan besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur atau sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Dengan tersedianya aset tetap berupa sarana dan prasana tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas masyarakat dan kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator terhadap kualitas hidup masyarakat dan ukuran kinerja pemerintah daerah.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM atau dalam bahasa Inggrisnya Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu:

1) Lamanya hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, United Nations Development Programme (UNDP)

atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth) yang biasa dinotasikan dengan e_0 . Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, e_0 sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia e_0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

2) Pengetahuan/Tingkat Pendidikan

Pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (Literacy Rate) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School).

3) Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

IPM/HDR dikembangkan oleh ahli ekonomi bernama Amartya Sen (India) dan Mahbub ul Haq (Pakistan), dan dibantu oleh Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad Desai (London School of Economics) pada 1990. Sejak itu indeks ini digunakan pada laporan IPM tahunan Program pembangunan PBB.

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi:

- a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
- b. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
- c. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
United Nations Development Programme (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C_{(i)} &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2 (C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2 (Z)^{1/2} + 3 (C_{(i)} - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &\text{dan seterusnya}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

$C_{(i)}$ = Purchasing Power Parity (PPP) dari nilai riil pengeluaran perkapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

Di Indonesia, IPM digunakan sebagai indikator terhadap keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Sumber data penghitungan komponen IPM berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS setiap tahun yang mencakup seluruh Provinsi di Indonesia.

Tahapan Perhitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya (Indeks Harapan Hidup = X_1 , Pengetahuan = X_2 , dan Standar Hidup Layak = X_3). Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(\min)}}{X_{(\max)} - X_{(\min)}}$$

Keterangan:

$X_{(i)}$ = Komponen IPM ke-i

$X_{(min)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

$X_{(maks)}$ = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM

No	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	Standar UNDP
4	Daya Beli (Rupiah PPP)	732.720 ^{a)} 1.332.720 ^{c)}	300.000 ^{b)} 900.000 ^{d)}	Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2015

Keterangan:

- a) Proyeksi pengeluaran riil per unit per tahun untuk daerah yang memiliki angka tertinggi pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen selama kurun 1993-2018.
- b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk daerah yang memiliki angka Terendah tahun 1990 daerah pedesaan.
- a) dan b) digunakan untuk perhitungan IPM 1990 , 1993 dan 1996
- c) dan d) digunakan untuk perhitungan IPM 1999-sekarang

Selanjutnya nilai IPM dihitung dengan cara menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan rumus:

$$IPM = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

Dimana:

X_1 = Indeks Angka Harapan Hidup

X_2 = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

X_3 = Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan

Hasil perhitungan IPM memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran yang disentuh yaitu angka harapan hidup 85 tahun. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standart hidup layak. Semakin dekat IPM suatu wilayah terhadap angka 100 maka semakin dekat dengan sasaran yang dicapai (Miftah, 2012).

Lembaga pemerintah yang menyediakan informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Badan Pusat Statistik sebagai lembaga statistik pemerintah, memiliki peranan sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. (UU No. 16 Tahun 1997).

2.1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara yang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara (UUD 1945 Pasal 26 ayat 2). Jadi, jumlah penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Permasalahan mengenai kependudukan dipelajari dan diuraikan dalam ilmu Demografi. Menurut Mantra (2000:1), dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peranan yang penting. Makin lengkap dan akurat data-data kependudukan yang tersedia, makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh, dalam perencanaan pembangunan pendidikan, diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia sekolah. Kemudian Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional juga membutuhkan data jumlah penduduk, yaitu data jumlah penduduk pasangan usia subur. Oleh sebab itu, semua perencanaan pembangunan sangat membutuhkan data penduduk tidak saja pada saat merencanakan pembangunan, tetapi juga pada masa-masa mendatang. Perkembangan jumlah penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam dan sekitarnya (Mantra, 2000).

Istiyani (2013: 5) juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang penduduk penting untuk lembaga-lembaga pemerintah. Perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan pendidikan, perpajakan, kesejahteraan sosial, kemiliteran, perumahan, pertanian dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, jalan, rumah-rumah sakit, pusat-pusat pertokoan, dan pusat-pusat rekreasi akan menjadi lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan. Maka dari itu, data kependudukan sangat diperlukan untuk bahan

pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah pada waktu yang akan datang.

Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan, misalnya kebutuhan terhadap lapangan kerja. Penumpukan jumlah penduduk memerlukan persiapan lapangan kerja yang lebih luas. Apabila tidak disiapkan SDMnya dan lapangan kerja, akan berdampak buruk pada semua aspek kehidupan. (Istiyani, 2013: 55).

Lembaga pemerintah yang menyediakan informasi mengenai Jumlah Penduduk adalah Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Andaiyani (2012) - Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Pegawai	Indek Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang bersifat negatif. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif. Belanja Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang bersifat negatif.
2	Erlis (2014) - Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Sisa Lebih Pembiayaan	Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan	Secara simultan, penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi

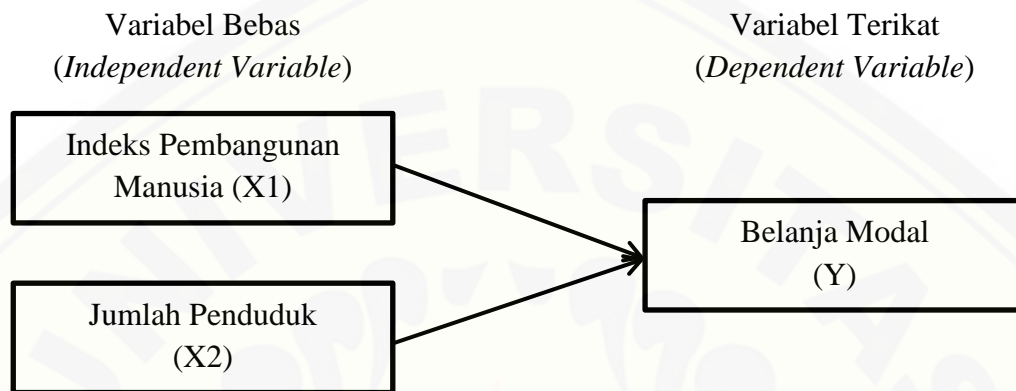
	<p>Anggaran Terhadap Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera)</p>	<p>Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi, Dana Alokasi Umum sebagai Variabel Moderasi, Luas Wilay sebagai Variabel Kontrol</p>	<p>oleh PE, SiLPA, PAD, DAU, LW, PE_PAD, dan PE_DAU.</p> <p>Secara parsial, hanya SiLPA dan PAD yang signifikan berpengaruh terhadap belanja modal.</p> <p>Sedangkan PE, DAU, LW, PE_PAD, dan PE_DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</p>
3	<p>Hartyanto (2014) - Studi Tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SWP Gerbangkertosusila diprediksi akan mengalami penurunan ketika variabel penelitian yakni PDRB, Belanja Langsung Pemda dan Jumlah Penduduk tidak mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan proxy Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SWP Gerbangkertosusila baik secara parsial maupun simultan.</p> <p>Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SWP Gerbangkertosusila baik secara parsial maupun simultan.</p> <p>Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial dan berpengaruh positif secara simultan.</p>

4	Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu (2000) - Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago.	GGDP (Growth rate of real capita GDP), FD (Fiscal Decentralization), HRS (Household responsibility system), FISCAP (Fiscal Capacity), POPSHR (Rural Population), TPOP (Total Population), FPMP (Relative Price of farm products to nonfarm product), NSOESH (Share of Non-SOEs' output in the total output, GI (Growth rate per capita fixed asset investment, FDAVG (An alternative measure for fiscal decentralization)	Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Reformasi pedesaan, akumulasi modal, dan pengembangan sektor non negara adalah kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di China.
---	--	---	--

2.3 Kerangka Teoritis

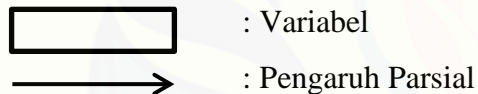
Pemberian otonomi daerah yang lebih luas memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Termasuk dalam upaya mengatur belanja daerah yang terjadi. Agar dana daerah dapat dialokasikan dengan ekonomis efisiensi dan efektif diperlukan suatu manajemen yang terencana dengan baik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana salah satunya dalam bentuk anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal harus didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk memudahkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat. Besarnya belanja modal yang dianggarkan dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Keterangan:



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, dan landasan teoritis sebagai kaitan keseluruhan maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal

Dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang bertugas membuat kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal. Dalam konteks pemerintahan, warga Indonesia yang diwakilkan legislatif (DPRD) berperan sebagai pihak prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai pihak agen. Oleh sebab itu, segala

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan daerah. Kinerja pemerintah daerah yang baik akan menghasilkan pembangunan daerah yang baik pula. Kinerja pemerintah suatu daerah dapat diukur dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah bersangkutan.

Indeks Pembangunan Manusia, disingkat IPM atau dalam bahasa Inggrisnya Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu: (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan / tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak.

Kualitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pembangunan dari daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah atau wilayah, maka semakin kecil pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya tingkat pembangunan yang tinggi tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak pengeluaran untuk melengkapi infrastruktur-infrastruktur pada daerah tersebut. Karena pada daerah dengan tingkat pembangunan yang tinggi, infrastruktur pada daerah tersebut lebih lengkap dibandingkan dengan daerah dengan tingkat pembangunan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari lamanya hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang lebih tinggi pada daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi daripada daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andaiyani (2012) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap jumlah alokasi belanja modal. Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal pemerintah. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Teori Keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal yang memberikan tugas legislatif (DPRD) untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi eksekutif (Pemerintah Daerah) yang menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan atau pelayanan publik. Pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Semakin banyak masyarakat pada suatu daerah, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka dari itu, pihak legislatif dan eksekutif membuat kebijakan yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, informasi mengenai jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

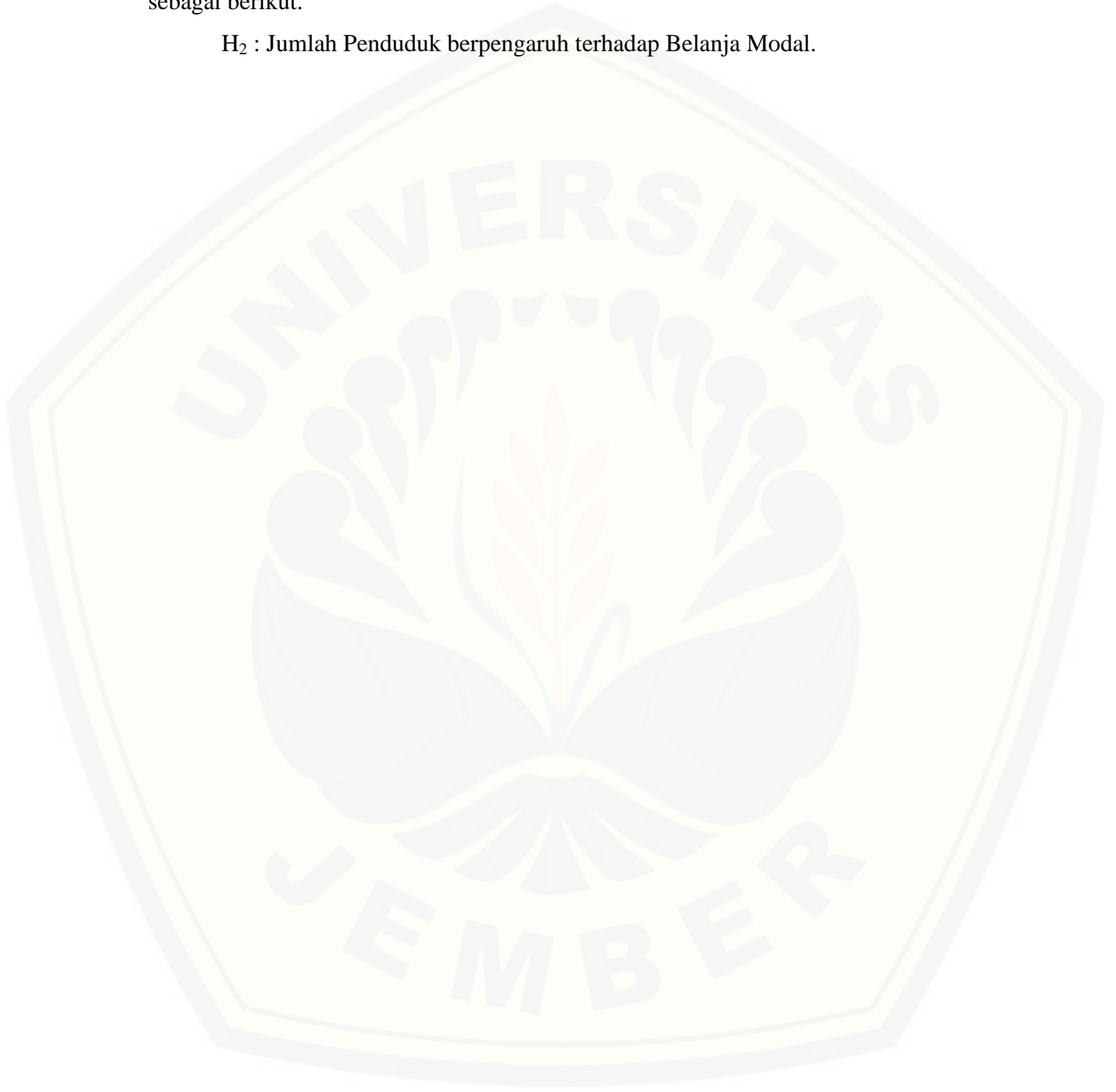
Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan.

Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak akan membuat belanja modal pada daerah tersebut lebih banyak daripada daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartyanto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif secara simultan. Berdasarkan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa Jumlah Penduduk pada suatu daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal pemerintah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penentu dari belanja modal pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada alokasi Belanja Modal.

Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut.

H_2 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013, yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Jawa Timur, dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, data Belanja Modal diperoleh dengan cara menelusuri Laporan APBD tahun 2012-2014 dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka dan bersifat objektif.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu (Sanusi, 2014:87). Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dimana Provinsi Jawa Timur terdapat 38 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 38 kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 114 pengamatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (jatim.bps.go.id), dimana dari data ini diperoleh data mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011-2013.

Selain itu, data diperoleh dengan cara menelusuri Laporan APBD tahun 2012-2014 dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD tersebut diperoleh data mengenai Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data juga diperoleh dari jurnal, artikel maupun literature yang berhubungan dengan data penelitian.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai (Sanusi, 2014:49). Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu variable terikat (*dependent variable*) dan variable bebas (*independent variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal yang disimbolkan dengan (Y). Sedangkan untuk variable bebas dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disimbolkan dengan (X_1) dan Jumlah Penduduk yang disimbolkan dengan (X_2).

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat atau variable tergantung (*dependent variable*) adalah variable yang dipengaruhi oleh variable lain (Sanusi, 2014:50). Variabel terikat yang

digunakan dalam penelitian ini Belanja Modal. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal lebih bersifat jangka panjang daripada belanja operasional.

Peningkatan pelayanan pada sektor publik dapat meningkatkan minat para investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Maka dari itu, perubahan komposisi belanja merupakan upaya logis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Maharani dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012), dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Indikator Belanja Modal (Y) dalam penelitian ini adalah jumlah belanja modal yang diperoleh dari Laporan APBD tahun 2012-2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia. Variabel Belanja Modal akan diubah ke dalam bentuk skor standar dengan menggunakan *z-score* dan *t-score* (menggunakan SPSS) karena cara pengukuran Belanja Modal berbeda dengan variabel lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi variable lain (Sanusi, 2014:50). Variable bebas yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk.

a. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indikator variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) di dalam penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yang diperoleh dari data Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2011-2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia. Variabel Indeks Pembangunan Manusia akan diubah ke dalam bentuk skor standar dengan menggunakan *z-score* dan *t-score* (menggunakan SPSS) karena cara pengukuran Indeks Pembangunan Manusia berbeda dengan variabel lainnya, yaitu Belanja Modal dan Jumlah Penduduk.

b. Variabel Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara yang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara (UUD 1945 Pasal 26 ayat 2). Jumlah penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah serta tercatat secara sah

berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan.

Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak akan membuat belanja modal pada daerah tersebut lebih banyak daripada daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit.

Indikator variabel Jumlah Penduduk (X_2) di dalam penelitian ini adalah data sensus penduduk tahun 2011-2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Wilayah Jawa Timur. Variabel Jumlah Penduduk akan diubah ke dalam bentuk skor standar dengan menggunakan *z-score* dan *t-score* (menggunakan SPSS) karena cara pengukuran Jumlah Penduduk berbeda dengan variabel lainnya, yaitu Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan generalisasi. Tujuan analisis ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Belanja Modal.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat bebas dari asumsi klasik, dimana data tersebut telah terdistribusi dengan normal dan tidak mengandung multikolienaritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Untuk itu diperlukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji dengan rumus Kolmogorov-Smirnov SPSS. Selain itu peneliti juga menggunakan grafik normal probability plot. Dengan plot ini masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan pada distribusi normal. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Kolmogorov-Smirnov SPSS, yaitu:

1. Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) $>0,05$.
2. Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) $<0,05$.

b. Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji antara variabel bebas dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Multikolienaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai tolerance di atas 10%. Pada umumnya VIF lebih besar daripada 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan

multikolienaritas dengan variabel bebas lainnya. Oleh sebab itu, ketentuan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

c. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedasitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel bebas (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedasitas (Ghozali, 2011). Uji Heteroskedastisitas juga dapat diuji dengan uji GLEJSER, residual dapat dikatakan homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) apabila signifikansi diatas 0,05.

d. Uji Autokolerasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi gejala autokolerasi dalam regresi digunakan Durbin Watson dan statisti test dengan ketentuan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Ho	Keputusan	Jika
Tidak ada autokolerasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokolerasi positif	No decision	$d1 \leq d \leq du$
Tidak ada autokolerasi negatif	Tolak	$4 - d1 < d < 4$

Tidak ada autokolerasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokolerasi positif/negatif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

3.5.3 Pengujian Hipotesis

a. Metode Regresi Linier Berganda

Pengujian Hipotesis dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variable bebas (*independent variable*) terhadap variable terikat (*dependent variable*). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- A = Konstanta
- B = Koefisien Regresi
- X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X_2 = Jumlah Penduduk
- e = error

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable bebas (*independent variable*). Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variable terikat (*dependent variable*). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variable bebas (*independent variable*) dalam menjelaskan variable terikat (*dependent variable*).

c. Uji F

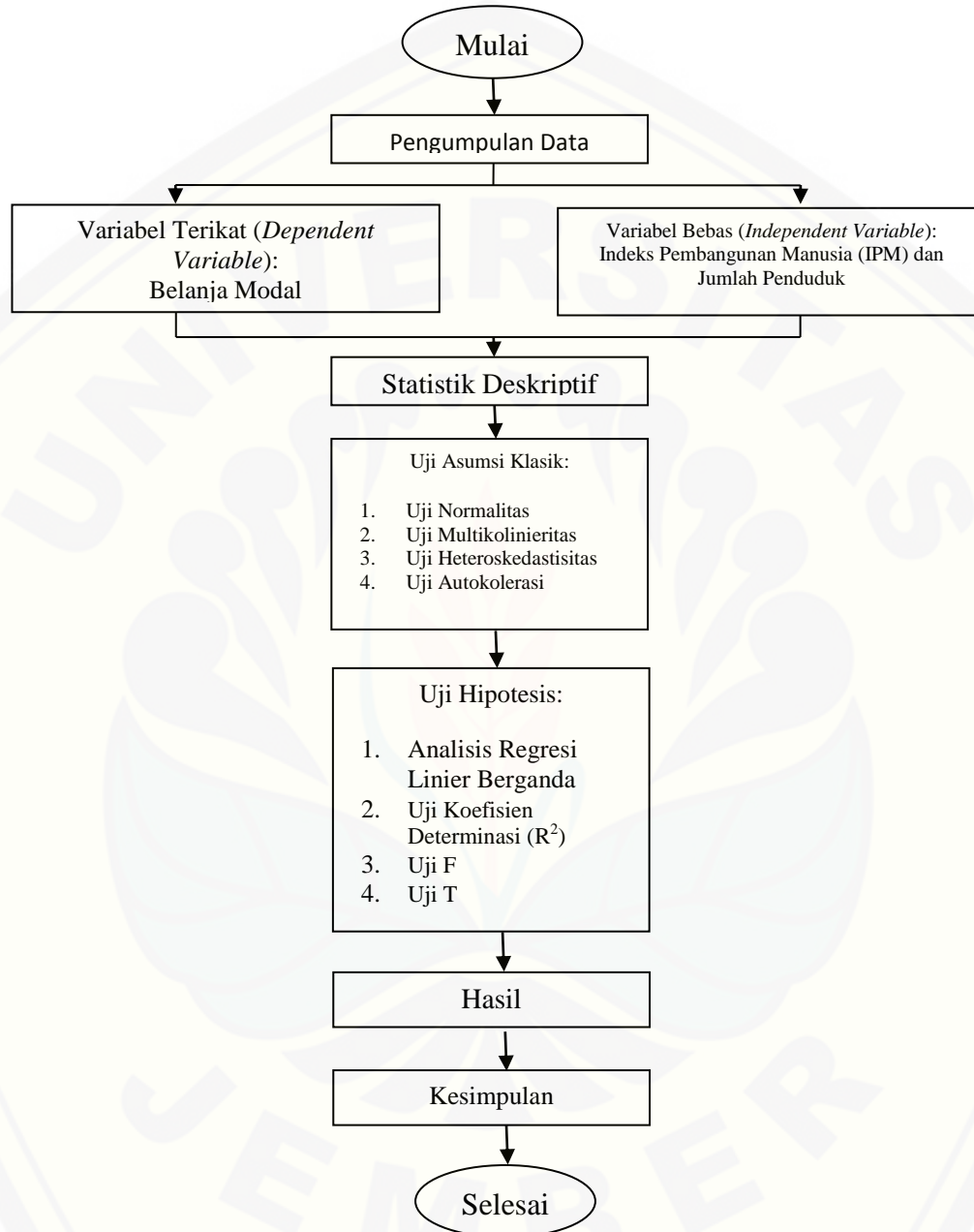
Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukakan pada analisis regresi. Uji F dilakukan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p\text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95 % atau $(\alpha) = 0,05$ (Ghozali, 2011).

d. Uji t (Uji Parsial)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah masing-masing variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variable terikat (*dependent variable*). Pengujian pada uji hipotesis secara parsial ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.4 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dimana Provinsi Jawa Timur terdapat 38 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 pemerintahan kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 38 kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 114 pengamatan.

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Pacitan	20	Magetan
2	Ponorogo	21	Ngawi
3	Trenggalek	22	Bojonegoro
4	Tulungagung	23	Tuban
5	Blitar	24	Lamongan
6	Kediri	25	Gresik
7	Malang	26	Bangkalan
8	Lumajang	27	Sampang
9	Jember	28	Pamekasan
10	Banyuwangi	29	Sumenep
11	Bondowoso	30	Kota Kediri
12	Situbondo	31	Kota Blitar
13	Probolinggo	32	Kota Malang
14	Pasuruan	33	Kota Probolinggo

15	Sidoarjo	34	Kota Pasuruan
16	Mojokerto	35	Kota Mojokerto
17	Jombang	36	Kota Madiun
18	Nganjuk	37	Kota Surabaya
19	Madiun	38	Kota Batu

Sumber: Lampiran 1 (data diolah)

4.2 Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Belanja Modal pada tahun 2012-2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga 2013. Selengkapnya data-data tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan generalisasi. Tujuan analisis ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Belanja Modal (Y), Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Jumlah Penduduk (X_2).

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel yang Diteliti

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Y	114	57.776	2.000.778	304.012,82	265.237,948
X1	114	60,78	78,97	71,8715	4,55410
X2	114	120.873	2.821.929	999.390,61	628.951,297
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Lampiran 3

Keterangan tabel:

Y = Belanja Modal

X1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X2 = Jumlah Penduduk

Berdasarkan tabel 4.2 yang menyajikan statistik deskriptif data pemerintahan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, terdapat adanya data outlier. Menurut Ghozali (2011:36), outlier adalah kasus atau data yang muncul dalam bentuk ekstrim. Data dikatakan outlier apabila nilai Z lebih besar dari +2,5 atau Z lebih kecil dari -2,5 (Ulwan, 2015). Setelah dilakukan pendeteksian data outlier, terdapat 3 data outlier sehingga kini jumlah data pada penelitian ini menjadi 111 data dan 37 pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berikut adalah rincian data yang dibuang karena terdeteksi outlier.

Tabel 4.3 Rincian Data Outlier

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	Jumlah
Kota Surabaya	√	√	√	3
Total Data Outlier				3

Tabel 4.4 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang Digunakan Setelah Deteksi Outlier

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Pacitan	20	Magetan
2	Ponorogo	21	Ngawi
3	Trenggalek	22	Bojonegoro
4	Tulungagung	23	Tuban
5	Blitar	24	Lamongan

6	Kediri	25	Gresik
7	Malang	26	Bangkalan
8	Lumajang	27	Sampang
9	Jember	28	Pamekasan
10	Banyuwangi	29	Sumenep
11	Bondowoso	30	Kota Kediri
12	Situbondo	31	Kota Blitar
13	Probolinggo	32	Kota Malang
14	Pasuruan	33	Kota Probolinggo
15	Sidoarjo	34	Kota Pasuruan
16	Mojokerto	35	Kota Mojokerto
17	Jombang	36	Kota Madiun
18	Nganjuk	37	Kota Batu
19	Madiun		

Sumber: Lampiran 2 (data diolah)

Berikut adalah hasil analisis deskriptif setelah dilakukan penghapusan data outlier.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel yang Diteliti

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Y	111	57.776	2.000.778	304.012,82	265.237,948
X1	111	60,78	78,97	71,8715	4,55410
X2	111	120.873	2.821.929	999.390,61	628.951,297
Valid N (listwise)	111				

Sumber: Lampiran 3

Keterangan tabel:

Y = Belanja Modal

X1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X2 = Jumlah Penduduk

Berdasarkan tabel 4.5 yang menyajikan statistik deskriptif data pemerintahan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013, diketahui nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata untuk masing-masing variabel dependen maupun variabel independen yaitu:

1. Variabel belanja modal (Y) memiliki nilai rata-rata Rp 267.350.610.000 dan standar deviasi 134.494,021. Adapun nilai minimum dari belanja modal sebesar Rp 57.776.000.000 merupakan belanja modal dari Kota Pasuruan tahun 2012. Sedangkan nilai maksimum dari belanja modal sebesar Rp 798.970.000.000 merupakan belanja modal dari Kabupaten Sidoarjo tahun 2014. Belanja modal yang tinggi mencerminkan masih tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana pada suatu daerah. Hal ini dikarenakan belanja modal adalah belanja pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Tidak hanya itu, belanja modal yang tinggi mencerminkan masih kurangnya pelayanan publik pada suatu daerah, sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut pemerintah daerah tersebut mengeluarkan belanja modal yang lebih banyak daripada daerah dengan pelayanan publik (sarana dan prasarana) yang tinggi.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) memiliki nilai rata-rata 71,6955 dan standar deviasi 4,48464. Adapun nilai minimum dari Indeks Pembangunan Manusia sebesar 60,78 merupakan Indeks Pembangunan Manusia dari Kabupaten Sampang tahun 2011. Sedangkan nilai maksimum dari Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,78 merupakan Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang tahun 2013. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi mencerminkan bahwa pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau

wilayah sangat baik. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin baik pula pencapaian hasil pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan tingginya Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan angka harapan yang tinggi, tingkat pengetahuan/pendidikan masyarakat yang tinggi, serta standar hidup layak yang sangat baik. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi mencerminkan kinerja pemerintahan daerah yang baik.

3. Variabel jumlah penduduk (X_2) memiliki nilai rata-rata 950.772 jiwa dan standar deviasi 561.892,938. Adapun nilai minimum dari jumlah penduduk sebesar 120.873 jiwa merupakan jumlah penduduk dari Kota Mojokerto tahun 2011. Sedangkan nilai maksimum dari jumlah penduduk sebesar 2.508.698 jiwa merupakan jumlah penduduk dari Kota Malang tahun 2013. Jumlah Penduduk yang berbeda-beda pada tiap daerah mengakibatkan kebutuhan pada masing-masing daerah berbeda pula. Tingginya jumlah penduduk akan dihadapkan pada seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu daerah, maka semakin banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji dengan rumus Kolmogorov-Smirnov SPSS. Selain itu peneliti juga menggunakan grafik *Normal Probability Plot*. Dengan plot ini masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan pada distribusi normal. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis

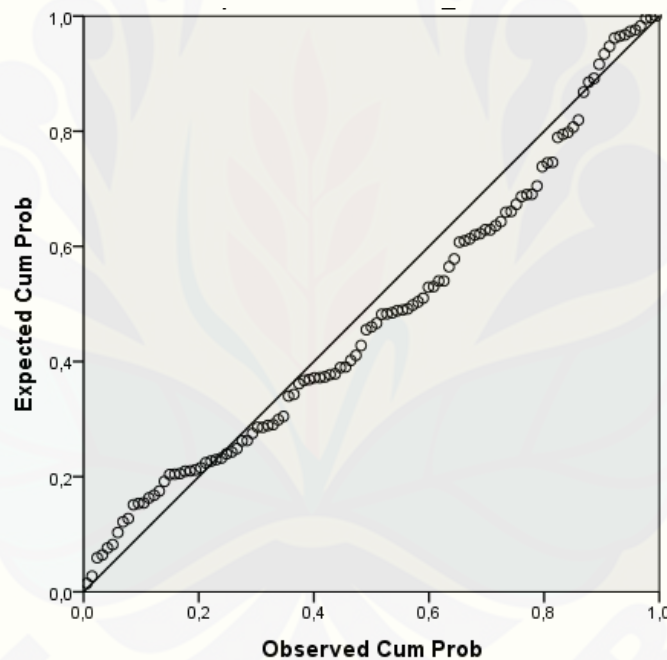
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Kolmogorov-Smirnov SPSS, yaitu:

1. Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) $> 0,05$.
2. Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) $< 0,05$.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Normal Probability Plot* dapat dilihat pada gambar 4.1.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* di atas, terlihat membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,965
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,309

Sumber: Lampiran 4 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,309 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji antara variabel bebas dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Multikolienaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai tolerance di atas 10%. Pada umumnya VIF lebih besar daripada 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolienaritas dengan variabel bebas lainnya. Oleh sebab itu, ketentuan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil dari pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
X ₁	0,906	1,104	Tidak terjadi multikolinieritas
X ₂	0,906	1,104	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Lampiran 5 (data diolah)

Keterangan tabel:

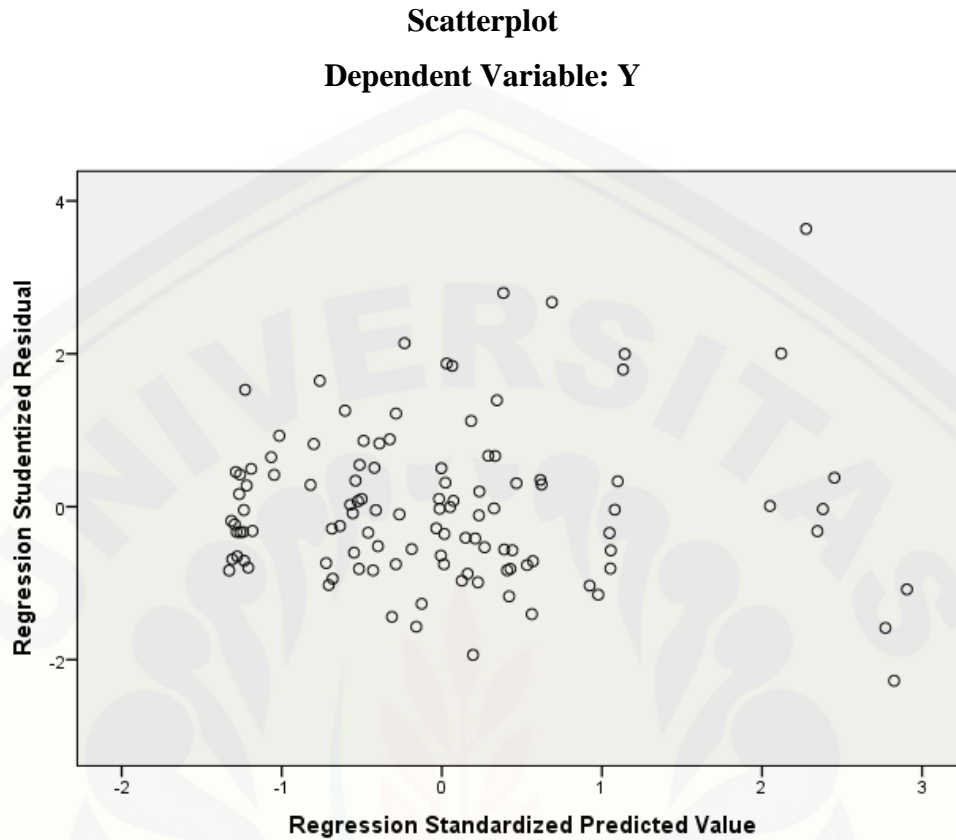
X₁ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X₂ = Jumlah Penduduk

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa data pada penelitian ini mempunyai nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan kriteria di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedasitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel bebas (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedasitas (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terlihat pola yang jelas (tidak ada pola tertentu dalam scatter plot diagram) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas juga dapat diuji dengan uji GLEJSER, residual dapat dikatakan homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) apabila signifikansi diatas 0,05. Hasil uji Glejser dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji GLEJSER

Variabel	Signifikansi Heteroskedasitas	Signifikansi	Keterangan
X ₁	< 0,05	1,104	Homoskedasitas
X ₂	< 0,05	1,104	Homoskedasitas

Sumber: Lampiran 6 (data diolah)

Keterangan Tabel:

X₁ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X₂ = Jumlah Penduduk

Berdasarkan tabel 4.8, residual dari setiap variabel dalam penelitian ini memiliki signifikansi di atas 0,05, sehingga memenuhi asumsi homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,793 ^a	0,618	0,550	83.090,128	1,896

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,896. Pengambilan keputusan tidak ada autokorelasi jika $du < d < 4-du$. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 111, dan variabel independen (k) 2. Maka didapat nilai $du = 1,7273$, sehingga dari nilai DW sebesar 1,896 terletak diantara $du < d < 4-du$ yaitu $1,7273 < 1,896 < 2,2727$. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan pada analisis regresi. Uji F dilakukan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p\ value < (\alpha) = 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 5 % atau $(\alpha) = 0,05$ (Ghozali, 2011). Pada tabel 4.10 dapat dilihat hasil dari uji F yang telah dilakukan.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6825,371	2	3412,686	88,288	0,000 ^b
	Residual	4174,629	108	38,654		
	Total	11000,000	110			

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan hasil perhitungan uji F yang terlihat pada tabel 4.10 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 88,288 lebih besar daripada F_{tabel} sebesar 3,08 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dan angka Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 ($Sig. < 0,05$), maka dapat

disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk adalah model yang fit (layak).

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable bebas (*independent variable*). Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variable terikat (*dependent variable*). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel bebas (*independent variable*) dalam menjelaskan variabel terikat (*dependent variable*). Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square* yang diperlihatkan sebagai berikut.

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,788 ^a	0,620	0,613	6,21723

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan hasil *Adjusted R Square* pada tabel 4.11 terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,613 atau 61,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 61,3% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk, dan sisanya yaitu 38,7% (100% - 38,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar persamaan.

4.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik, maka model regresi layak sebagai alat untuk mendeteksi hubungan antar variabel independen yang diajukan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Jumlah Penduduk (X_2) dengan variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y). Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) versi 20. Hasil pengolahan dapat dilihat pada lampiran, sedangkan rekapitulasi hasil data SPSS adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-stat	Sig.
(Constant)	2,386	0,471	0,639
X_1	0,134	2,148	0,034
X_2	0,818	13,139	0,000

Sumber: Lampiran 8 (data diolah)

Keterangan tabel:

X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_2 = Jumlah Penduduk

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat diketahui konstanta dan koefisien regresi masing-masing variabel yang diteliti, sehingga diperoleh persamaan hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,386 + 0,134 X_1 + 0,818 X_2$$

Persamaan hasil regresi berganda tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,386. Hal ini berarti jika Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk pada suatu daerah tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka nilai Belanja Modal sebesar nilai konstanta yaitu 2,386 satuan.

- 2) Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,134 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai hubungan yang searah terhadap variabel Belanja Modal. Setiap kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar satu satuan, maka variabel Belanja Modal akan naik sebesar 0,134 satuan juta rupiah.
- 3) Nilai koefisien Jumlah Penduduk sebesar 0,818 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa Jumlah Penduduk mempunyai hubungan yang searah terhadap variabel Belanja Modal. Setiap kenaikan nilai Jumlah Penduduk sebesar satu satuan jiwa, maka variabel Belanja Modal akan naik sebesar 0,818 satuan juta rupiah.

4.5.4 Uji t (Uji Parsial)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah masing-masing variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variable terikat (*dependent variable*). Pengujian pada uji hipotesis secara parsial ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $p_value < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai signifikansi $p_value > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
X1	0,034	H ₁ diterima
X2	0,000	H ₂ diterima

Sumber: Lampiran 8 (data diolah)

Keterangan tabel:

X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_2 = Jumlah Penduduk

Berdasarkan tabel 4.13, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (X_1)

Nilai signifikansi adalah sebesar 0,034, maka probabilitasnya di bawah 0,05. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sehingga sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

2) Jumlah Penduduk (X_2)

Nilai signifikansi adalah sebesar 0,000, maka probabilitasnya di bawah 0,05. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk pada penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

4.6 Pembahasan Hipotesis

4.6.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,134 dan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang berada di bawah 0,05 ($0,034 < 0,05$) sehingga sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Dengan diterimanya hipotesis pertama, maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Andaiyani (2012) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal, ini berarti bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi berarti daerah tersebut sebenarnya telah tergolong daerah yang sudah maju. Daerah maju dengan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang baik memicu peningkatan pendapatan daerah. Dengan bertambahnya pendapatan pada daerah tersebut, pemerintah dapat menganggarkan belanja modalnya lebih banyak.

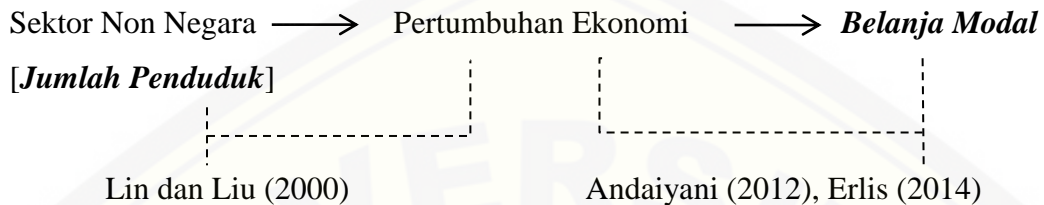
Sebagai pihak agen yang bertanggungjawab kepada masyarakat, kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan daerah. Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sehingga mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam menggunakan Belanja Modalnya.

4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Variabel Jumlah Penduduk (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,818 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

Dengan diterimanya hipotesis kedua, maka hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Lin dan Liu (2000) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa Jumlah Penduduk (Total Population (TPOP)) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta Andaiyani (2012) dan Erlis (2014) dalam penelitiannya

yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 4.3 Penjelasan Hasil Penelitian

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak prinsipal yang memberikan tugas legislatif (DPRD) untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi eksekutif (Pemerintah Daerah) yang menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan atau pelayanan publik. Pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Semakin banyak masyarakat pada suatu daerah, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka dari itu, pihak legislatif dan eksekutif membuat kebijakan yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, informasi mengenai jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah mempertimbangkan Jumlah Penduduk di daerahnya dalam mengambil keputusan untuk penggunaan Belanja Modalnya

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Istiyani (2013: 5) juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang penduduk penting untuk lembaga-lembaga pemerintah. Perencanaan-perencanaan daerah akan menjadi lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan. Oleh sebab itu, dalam penggunaan Belanja Modal pemerintah daerah dalam rangka membangun pelayanan publik, informasi tentang Jumlah Penduduk sangatlah penting.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan arah hubungan yang bersifat positif, yang bermakna jika Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah sudah tinggi maka jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan menjadi tinggi.
- b. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan arah hubungan yang bersifat positif, yang bermakna jika Jumlah Penduduk suatu daerah tinggi maka jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan menjadi tinggi.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Peneliti hanya menggunakan data pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.

5.3 Saran

Dari beberapa kesimpulan dan keterbatasan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- a. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal, hal ini didasarkan bahwa sebesar 61,3% variabel pada penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga masih ada 38,7% variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap Belanja Modal.

- b. Disarankan untuk menggunakan lebih dari satu provinsi pada penelitian selanjutnya, agar dapat membandingkan provinsi satu dengan provinsi lainnya dan hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Andaiyani. 2012. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004-2013*. <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235> [13 April 2015]
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*. <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1> [13 April 2015]
- Barclay, George W. 1990. *Teknik Analisa Kependudukan 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2012. *LGF Anggaran - 2012*. [http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2012/LGF_Anggaran - 2012.zip](http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2012/LGF_Anggaran_-_2012.zip) [8 April 2015]
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. *LGF Anggaran - 2013*. http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data_dkd/update_dkd_16juli/A2013_Ringkas_150713.zip [8 April 2015]
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. *LGF Anggaran - 2014 Ringkas*. http://www.djpk.depkeu.go.id/images/dkdokt2014/LGF_Anggaran_2014_Ringkas.rar [8 April 2015]
- Erlis, Nola. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan*

- Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera)*. Skripsi. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2 (1): 53-64. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id> [18 Maret 2015]
- Hartyanto. Adi. 2014. *Studi Tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila*. <http://jimfeb.ub.ac.id> [18 Maret 2015]
- Ina dan Wahyu. 2015. *Mengubah Skor Mentah Menjadi Skor Standar*. <http://widhiarso.staff.ugm.ac.id> [11 Agustus 2015].
- Invonesia. 2013. *Luas Wilayah Negara Indonesia*. <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html> [16 April 2015].
- Istiyani, Nanik. 2013. *Buku Ajar Ekonomi Kependudukan*. Jember: Pustaka Radja.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. <http://www3.nccu.edu.tw> [22 Maret 2015]
- Mardiasmo. 2002. *Anggaran Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Publiknasional. 2012. *Ekonomi Jatim Paling Inklusif di Indonesia*. <http://publiknasional.com> [28 Juni 2015].
- Putra, Andika Dwi. 2012. *Geografi*. <http://www.academia.edu/7317220/Geografi> [16 April 2015].

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, Robert W. and Mark Bertozzi. 1998. Principals And Agents: An Explanatory Model For Public Budgeting. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 10 (3): 325-353 <http://pracademics.com> [28 Maret 2015]
- Sularno, Fitria Megawati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Ulwan, M. Nasihun. 2015. *Cara Mendeteksi Data Outlier dengan SPSS*. <http://www.portal-statistik.com/2015/04/cara-mendeteksi-data-outlier-dengan-spss.html> [11 Agustus 2015]
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN 1**Data Penelitian**

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Jutaan Rupiah)	IPM	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Pacitan	129.637	72,48	543.924
2	Ponorogo	201.250	71,15	860.093
3	Trenggalek	152.556	73,66	678.206
4	Tulungagung	211.610	73,76	995.729
5	Blitar	241.474	74,06	1.122.922
6	Kediri	311.983	72,28	1.508.206
7	Malang	433.754	71,17	2.459.982
8	Lumajang	213.674	68,55	1.012.121
9	Jember	490.067	65,53	2.345.851
10	Banyuwangi	331.831	69,58	1.564.833
11	Bondowoso	171.123	63,81	740.917
12	Situbondo	203.788	64,67	651.263
13	Probolinggo	273.892	63,84	1.102.412
14	Pasuruan	279.782	68,24	1.520.978
15	Sidoarjo	485.219	76,90	1.952.421
16	Mojokerto	282.531	73,89	1.031.213
17	Jombang	260.361	73,14	1.209.172
18	Nganjuk	200.041	71,48	1.022.752
19	Madiun	208.885	70,50	666.004
20	Magetan	159.310	73,17	623.933
21	Ngawi	114.606	69,73	822.366
22	Bojonegoro	300.091	67,32	1.216.781
23	Tuban	254.927	68,71	1.124.757
24	Lamongan	262.121	70,52	1.185.693
25	Gresik	210.529	75,17	1.183.665
26	Bangkalan	305.452	65,01	911.863
27	Sampang	237.699	60,78	882.711
28	Pamekasan	257.949	65,48	800.396
29	Sumenep	240.345	66,01	1.048.177
30	Kota Kediri	207.845	76,79	270.018
31	Kota Blitar	78.698	77,89	132.712
32	Kota Malang	308.621	77,76	824.858
33	Kota Probolinggo	78.253	74,85	218.283
34	Kota Pasuruan	57.776	73,89	187.310
35	Kota Mojokerto	112.858	77,50	120.873
36	Kota Madiun	132.742	77,07	171.926

37	Kota Surabaya	1.248.746	77,85	2.781.047
38	Kota Batu	104.196	74,93	191.254
39	Pacitan	107.354	72,88	544.229
40	Ponorogo	119.809	71,91	860.218
41	Trenggalek	219.924	74,09	678.791
42	Tulungagung	127.010	74,45	999.640
43	Blitar	245.273	74,43	1.126.151
44	Kediri	378.597	72,72	1.514.132
45	Malang	384.480	71,94	2.473.612
46	Lumajang	239.432	69,00	1.014.625
47	Jember	517.154	65,99	2.355.283
48	Banyuwangi	411.269	70,53	1.568.956
49	Bondowoso	179.135	64,98	744.067
50	Situbondo	249.808	65,06	654.153
51	Probolinggo	206.888	64,35	1.108.584
52	Pasuruan	275.582	69,17	1.531.025
53	Sidoarjo	653.209	77,36	1.981.096
54	Mojokerto	251.552	74,42	1.039.477
55	Jombang	268.472	73,86	1.214.086
56	Nganjuk	249.227	71,96	1.025.416
57	Madiun	201.370	70,88	666.519
58	Magetan	144.953	73,85	626.851
59	Ngawi	174.378	70,20	826.213
60	Bojonegoro	419.204	67,74	1.217.850
61	Tuban	308.689	69,18	1.129.050
62	Lamongan	214.333	71,05	1.191.239
63	Gresik	361.604	75,97	1.196.124
64	Bangkalan	337.486	65,69	919.002
65	Sampang	285.424	61,67	891.982
66	Pamekasan	190.561	66,51	808.057
67	Sumenep	263.707	66,41	1.051.763
68	Kota Kediri	190.730	77,20	271.655
69	Kota Blitar	106.499	78,31	133.578
70	Kota Malang	424.711	78,43	829.094
71	Kota Probolinggo	73.435	75,44	220.086
72	Kota Pasuruan	71.856	74,33	188.545
73	Kota Mojokerto	111.409	78,01	121.645
74	Kota Madiun	160.922	77,50	172.351
75	Kota Surabaya	1.732.019	78,33	2.791.761
76	Kota Batu	168.440	75,42	192.807
77	Pacitan	116.966	73,36	547.917

78	Ponorogo	148.278	72,61	863.890
79	Trenggalek	294.777	74,44	683.791
80	Tulungagung	209.146	74,79	1.009.411
81	Blitar	342.177	74,92	1.136.701
82	Kediri	535.500	73,29	1.530.504
83	Malang	488.910	72,34	2.508.698
84	Lumajang	272.450	69,50	1.023.818
85	Jember	557.789	66,60	2.381.400
86	Banyuwangi	553.679	71,02	1.582.586
87	Bondowoso	306.584	65,39	752.791
88	Situbondo	321.935	65,73	660.702
89	Probolinggo	281.323	65,19	1.123.204
90	Pasuruan	349.954	69,77	1.556.711
91	Sidoarjo	798.970	78,15	2.048.986
92	Mojokerto	357.681	75,26	1.057.808
93	Jombang	357.408	74,47	1.230.881
94	Nganjuk	380.133	72,49	1.033.597
95	Madiun	217.861	71,46	671.883
96	Magetan	222.684	74,34	625.703
97	Ngawi	230.906	70,86	824.587
98	Bojonegoro	540.069	68,32	1.227.704
99	Tuban	353.400	70,04	1.141.497
100	Lamongan	266.644	71,81	1.186.382
101	Gresik	561.011	76,36	1.227.101
102	Bangkalan	419.299	66,19	937.497
103	Sampang	264.116	62,39	913.499
104	Pamekasan	182.277	67,17	827.407
105	Sumenep	295.726	66,89	1.061.211
106	Kota Kediri	236.132	77,80	276.619
107	Kota Blitar	108.775	78,70	135.702
108	Kota Malang	425.780	78,78	840.803
109	Kota Probolinggo	115.814	75,94	223.881
110	Kota Pasuruan	168.510	74,75	192.285
111	Kota Mojokerto	146.874	78,66	123.806
112	Kota Madiun	181.800	78,17	174.114
113	Kota Surabaya	2.000.778	78,97	2.821.929
114	Kota Batu	263.218	76,09	196.189

Sumber: Belanja Modal = Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (data diolah).

IPM dan Jumlah Penduduk = Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (data diolah).

LAMPIRAN 2

Data Penelitian Setelah Deteksi Outlier dan Dilakukan Standarisasi Data

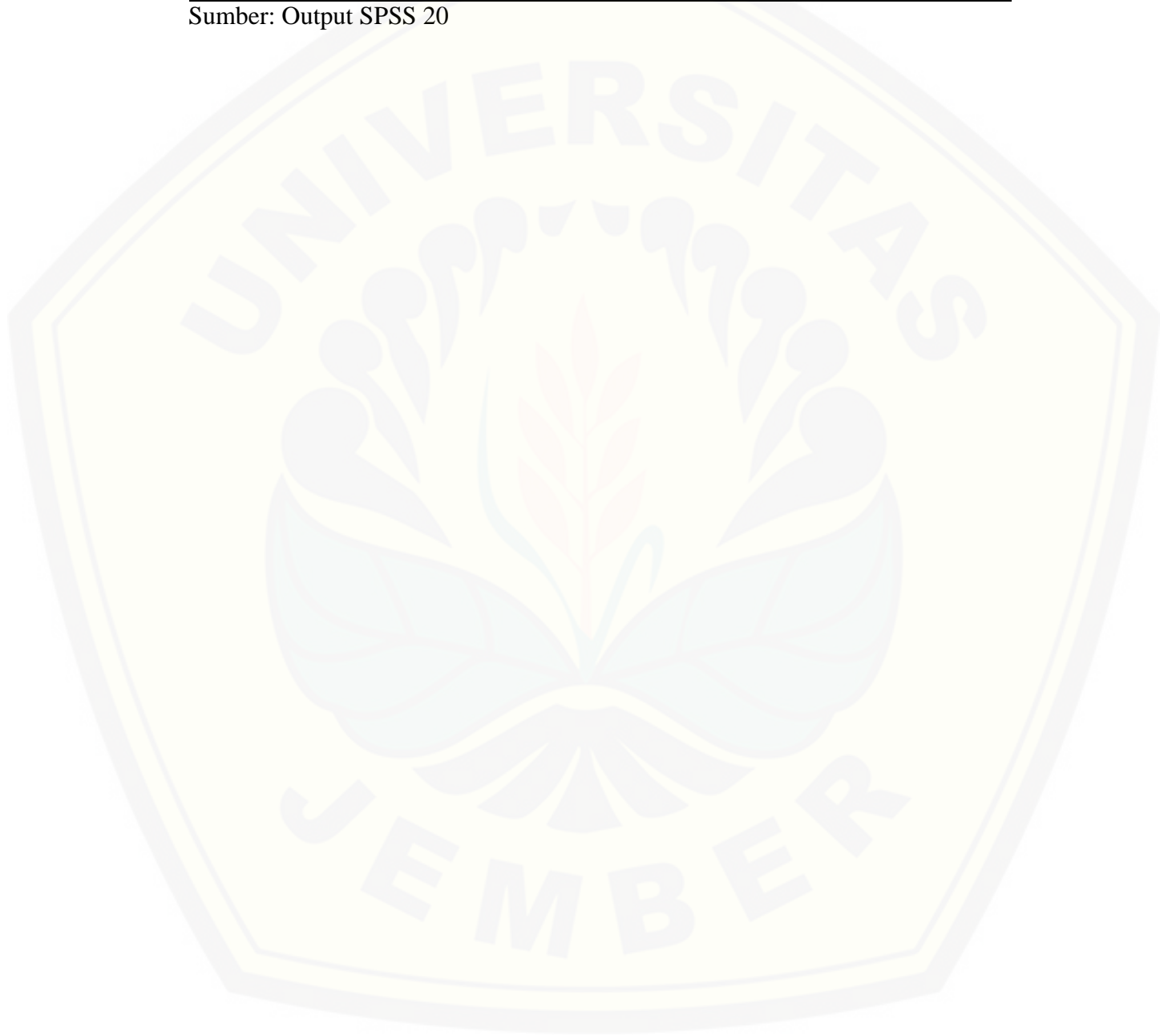
No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal	IPM	Jumlah Penduduk
1	Pacitan	39,76	51,75	42,76
2	Ponorogo	45,09	48,78	48,39
3	Trenggalek	41,46	54,38	45,15
4	Tulungagung	45,86	54,60	50,80
5	Blitar	48,08	55,27	53,06
6	Kediri	53,32	51,30	59,92
7	Malang	62,37	48,83	76,86
8	Lumajang	46,01	42,99	51,09
9	Jember	66,56	36,25	74,83
10	Banyuwangi	54,79	45,28	60,93
11	Bondowoso	42,85	32,42	46,27
12	Situbondo	45,27	34,33	44,67
13	Probolinggo	50,49	32,48	52,70
14	Pasuruan	50,92	42,29	60,15
15	Sidoarjo	66,20	61,61	67,83
16	Mojokerto	51,13	54,89	51,43
17	Jombang	49,48	53,22	54,60
18	Nganjuk	45,00	49,52	51,28
19	Madiun	45,65	47,33	44,93
20	Magetan	41,97	53,29	44,18
21	Ngawi	38,64	45,62	47,71
22	Bojonegoro	52,43	40,24	54,73
23	Tuban	49,08	43,34	53,10
24	Lamongan	49,61	47,38	54,18
25	Gresik	45,78	57,75	54,14
26	Bangkalan	52,83	35,09	49,31
27	Sampang	47,80	25,66	48,79
28	Pamekasan	49,30	36,14	47,32
29	Sumenep	47,99	37,32	51,73
30	Kota Kediri	45,58	61,36	37,88

31	Kota Blitar	35,97	63,81	35,44
32	Kota Malang	53,07	63,52	47,76
33	Kota Probolinggo	35,94	57,03	36,96
34	Kota Pasuruan	34,42	54,89	36,41
35	Kota Mojokerto	38,51	62,94	35,23
36	Kota Madiun	39,99	61,98	36,14
37	Kota Batu	37,87	57,21	36,48
38	Pacitan	38,10	52,64	42,76
39	Ponorogo	39,03	50,48	48,39
40	Trenggalek	46,47	55,34	45,16
41	Tulungagung	39,57	56,14	50,87
42	Blitar	48,36	56,10	53,12
43	Kediri	58,27	52,28	60,03
44	Malang	58,71	50,55	77,10
45	Lumajang	47,92	43,99	51,14
46	Jember	68,57	37,28	75,00
47	Banyuwangi	60,70	47,40	61,00
48	Bondowoso	43,44	35,03	46,32
49	Situbondo	48,70	35,20	44,72
50	Probolinggo	45,50	33,62	52,81
51	Pasuruan	50,61	44,37	60,33
52	Sidoarjo	78,69	62,63	68,34
53	Mojokerto	48,83	56,08	51,58
54	Jombang	50,08	54,83	54,69
55	Nganjuk	48,65	50,59	51,33
56	Madiun	45,09	48,18	44,94
57	Magetan	40,90	54,80	44,24
58	Ngawi	43,09	46,67	47,78
59	Bojonegoro	61,29	41,18	54,75
60	Tuban	53,07	44,39	53,17
61	Lamongan	46,06	48,56	54,28
62	Gresik	57,01	59,53	54,37
63	Bangkalan	55,21	36,61	49,43
64	Sampang	51,34	27,64	48,95
65	Pamekasan	44,29	38,44	47,46
66	Sumenep	49,73	38,21	51,80
67	Kota Kediri	44,30	62,27	37,91
68	Kota Blitar	38,04	64,75	35,46

69	Kota Malang	61,70	65,02	47,83
70	Kota Probolinggo	35,58	58,35	37,00
71	Kota Pasuruan	35,46	55,87	36,43
72	Kota Mojokerto	38,41	64,08	35,24
73	Kota Madiun	42,09	62,94	36,15
74	Kota Batu	42,65	58,31	36,51
75	Pacitan	38,82	53,71	42,83
76	Ponorogo	41,15	52,04	48,45
77	Trenggalek	52,04	56,12	45,25
78	Tulungagung	45,67	56,90	51,04
79	Blitar	55,56	57,19	53,31
80	Kediri	69,94	53,56	60,32
81	Malang	66,47	51,44	77,73
82	Lumajang	50,38	45,10	51,30
83	Jember	71,59	38,64	75,46
84	Banyuwangi	71,29	48,49	61,24
85	Bondowoso	52,92	35,94	46,48
86	Situbondo	54,06	36,70	44,84
87	Probolinggo	51,04	35,49	53,07
88	Pasuruan	56,14	45,71	60,78
89	Sidoarjo	89,53	64,39	69,54
90	Mojokerto	56,72	57,95	51,90
91	Jombang	56,70	56,19	54,99
92	Nganjuk	58,39	51,77	51,47
93	Madiun	46,32	49,47	45,04
94	Magetan	46,68	55,90	44,21
95	Ngawi	47,29	48,14	47,75
96	Bojonegoro	70,28	42,47	54,93
97	Tuban	56,40	46,31	53,39
98	Lamongan	49,95	50,26	54,19
99	Gresik	71,83	60,40	54,92
100	Bangkalan	61,30	37,72	49,76
101	Sampang	49,76	29,25	49,34
102	Pamekasan	43,67	39,91	47,80
103	Sumenep	52,11	39,28	51,97
104	Kota Kediri	47,68	63,61	38,00
105	Kota Blitar	38,21	65,62	35,49
106	Kota Malang	61,78	65,80	48,04

107	Kota Probolinggo	38,73	59,46	37,06
108	Kota Pasuruan	42,65	56,81	36,50
109	Kota Mojokerto	41,04	65,53	35,28
110	Kota Madiun	43,64	64,44	36,18
111	Kota Batu	49,69	59,80	36,57

Sumber: Output SPSS 20



LAMPIRAN 3**Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	114	57.776	2.000.778	304.012,82	265.237,948
X1	114	60,78	78,97	71,8715	4,55410
X2	114	120.873	2.821.929	999.390,61	628.951,297
Valid N (listwise)	114				

Descriptive Statistics

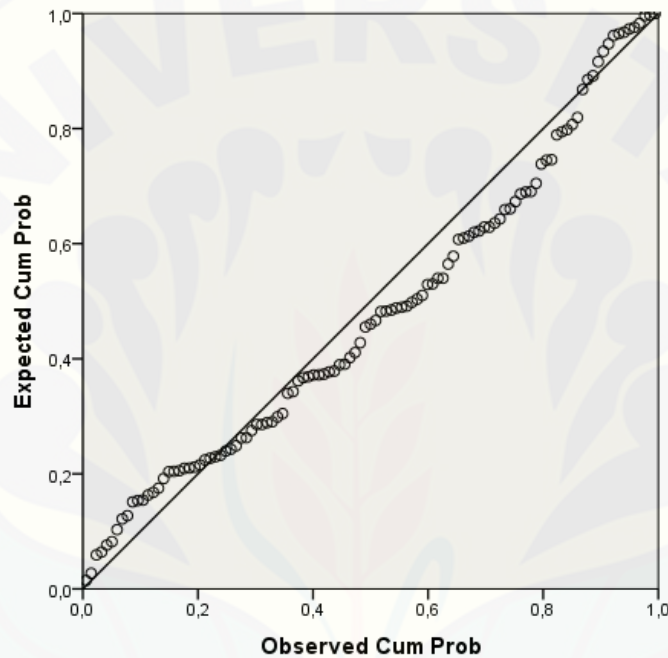
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	111	57.776	798.970	267.350,61	134.494,021
X1	111	60,78	78,78	71,6955	4,48464
X2	111	120.873	2.508.698	950.772,91	561.892,938
Valid N (listwise)	111				

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	6,16045204
	Absolute	,092
Most Extreme Differences	Positive	,092
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		,965
Asymp. Sig. (2-tailed)		,309

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Multikolienaritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,386	5,070		,471	,639		
1 X1	,134	,062	,134	2,148	,034	,906	1,104
X2	,818	,062	,818	13,139	,000	,906	1,104

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Heteroskedasitas

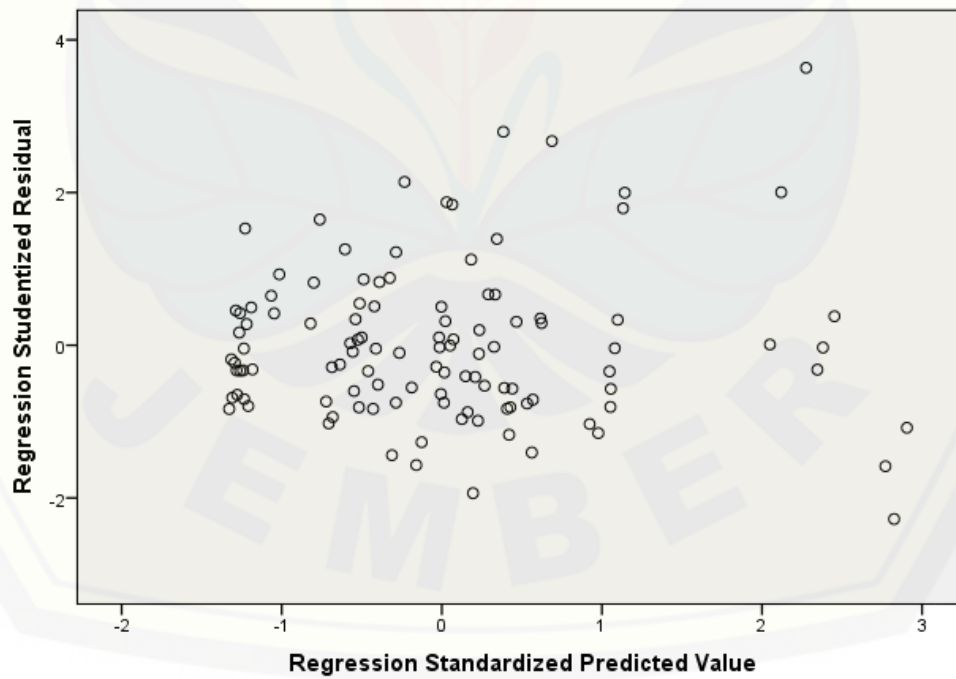
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-6,833	3,106		-2,200	,030		
1 X1	,093	,038	,231	2,434	,017	,906	1,104
X2	,137	,038	,340	3,582	,001	,906	1,104

a. Dependent Variable: GLEJSER

Scatterplot

Dependent Variable: Y



LAMPIRAN 7**Hasil Uji Autokorelasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,793 ^a	,629	,618	83.090,128	1,896

a. Predictors: (Constant), Lag_Y, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 8

Pengujian Hipotesis

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	t_X2, t_X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: t_Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,620	,613	6,21723

a. Predictors: (Constant), t_X2, t_X1

b. Dependent Variable: t_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6825,371	2	3412,686	88,288	,000 ^b
	Residual	4174,629	108	38,654		
	Total	11000,000	110			

a. Dependent Variable: t_Y

b. Predictors: (Constant), t_X2, t_X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,386	5,070		,471	,639
1 t_X1	,134	,062	,134	2,148	,034
t_X2	,818	,062	,818	13,139	,000

a. Dependent Variable: t_Y

